

**KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO
SEBAGAI ALAT BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI
KASUS DI POLRES MALANG)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

DELTA HUSADA

NIM: 201710110311414

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MALANG FAKULTAS HUKUM
2021**

PENULISAN HUKUM
KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO
SEBAGAI ALAT BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI
KASUS DI POLRES MALANG)

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelarkesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum**

Oleh:

**DELTA HUSADA
201710110311414**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MALANG FAKULTAS HUKUM
2021

KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI
ALAT BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI
POLRES MALANG)

Diajukan Oleh:

DELTA HUSADA

201710110311414

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

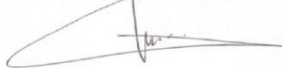
Pada, Sabtu 24 Juli 2021

Pembimbing Utama,



Mokh. Najih, SH., M.Hum., P.hD.

Pembimbing Pendamping,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Dekan,

Dr. Yungat, SH., M.Hum



Ketua Program Studi,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

SKRIPSI

Disusun oleh:

DELTA HUSADA

201710110311414

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 24 Juli 2021

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Mokh. Najih, SH., M.Hum., P.hD.

Sekretaris : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji I : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a member of the exam board listed to the left. The signatures are written on horizontal lines. The first signature is for the Chairman (Ketua), the second for the Secretary (Sekretaris), the third for the First Examiner (Penguji I), and the fourth for the Second Examiner (Penguji II).

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DELTA HUSADA

NIM : 201710110311414

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KEKUATAN HUKUM PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO SEBAGAI
ALAT BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI
POLRES MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Agustus 2021



Delta Husada

ABSTRAKSI

Nama : Delta Husada

NIM : 201710110311414

Judul : Kekuatan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Malang)

Pembimbing : Mokh. Najih, SH., M.Hum., Ph.D

Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Indonesia dan terdapat rekaman video merupakan masalah yang serius bagi pihak kepolisian, apabila kejadian tersebut dibiarkan saja maka banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi dan bahkan merugikan diri sendiri atau orang lain. Dalam berkendara masyarakat harus mematuhi peraturan mengenai lalu lintas yang terdapat di dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan. Permasalahan dalam penelitian hukum ini terkait bagaimana pembuktian pelanggaran lalu lintas dengan dibuktikan adanya rekaman video di Polres Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum serta bagaimana pembuktian rekaman video mengenai pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis sosiologis yaitu studi kasus di Polres Malang. Hasil dari penelitian memberikan kejelasan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dibuktikan dengan adanya rekaman video dapat ditindak, akan tetapi dalam prosesnya polisi harus menunggu laporan dari masyarakat terlebih dahulu. Hal ini kurang efektif dikarenakan polisi kurang aktif dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas. Selain kurang aktifnya pihak kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang dibuktikan dengan adanya rekaman video, syarat agar video tersebut dapat dijadikan bukti yang sah harus adanya keterangan dari laboratorium digital forensik.

Kata Kunci: Kekuatan hukum, Pembuktian, Pelanggaran Lalu Lintas, Rekaman Video, Kepolisian, Masyarakat

ABSTRACT

Name : Delta Husada

Student ID Number : 201710110311414

Title : The Power of Video Recording as Evidence in Traffic Violations (Case Study in the Malang Police Station)

Supervisor : Mokh. Najih, SH., M.Hum., Ph.D

Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Traffic violation cases that occur in Indonesia and there are video recordings are a serious problem for the police, if the incident is left alone, many traffic violations occur and even harm themselves or others. In driving, people must comply with traffic regulations contained in Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and road transportation. The problem in this legal research is related to how to prove traffic violations by being proven by video recordings at the Malang Resort Police. The purpose of this study was to determine the power of law and how to prove video recordings regarding traffic violations that occurred in the jurisdiction of the Malang Police. The method used in this research is a sociological juridical method, namely a case study at Polres Malang. The results of the study provide clarity that traffic violations as evidenced by the presence of video recordings can be dealt with, but in the process the police must wait for reports from the public first. This is less effective because the police are less active in handling traffic violation cases. In addition to the inactivity of the police in handling cases of traffic violations as evidenced by the presence of video recordings, the requirement for the video to be used as valid evidence must be a statement from the digital forensic laboratory.

Keywords: Legal force, Evidence, Traffic Violation, Video Recording, Police, Society

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Kekuatan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Malang)”**. Serta tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat-Nya.

Penulisan tugas akhir ini merupakan suatu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan (SH) di bidang Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca khususnya untuk menambah pengetahuan hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam penulisan tugas akhir ini. Untuk itu penulis haturkan terimakasih kepada:

1. Allah Subhannahu Wa Ta’ala yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Kedua orang tua penulis yaitu, yaitu ayahanda Saluri dan ibunda Tatuk Alfiati, yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
3. Bapak Dr. H. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya yang menjadi motivator penulis selama menimba ilmu di kampus putih tercinta beserta jajarannya. Semoga dapat membawa UMM menjadi lebih baik;
4. Bapak Dr. Tongat SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Bapak Dr. Haris SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Bapak Said Noor Prasetyo SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang hukum pidana internasional;
7. Bapak Mokh. Najih SH., M.Hum., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Nu’man Aunuh SH., M.Hum selaku Dosen Wali serta Dosen Pembimbing II penulis yang senantiasa selalu membimbing penulis dengansabar dan tulus dalam penulisan tugas akhir ini;
8. Seluruh bapak dan ibu dosen, instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, selaku motivator dan pembimbing selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya asatu persatu;

10. Bapak AIPDA Haris Kurniawan, SH selaku Kepala Bagian Urgan Tilang Polres Malang yang telah memberikan ijin penelitian dan dukungan atas pelaksanaan penelitian tugas akhir ini;
11. Terimakasih yang tulus untuk saudara penulis Transtoto Argo Kuncoro, Cyndera Alfiati, Tri Dewi Maria Kusuma Hati, dan Trystan Mordekhai Prabaswara Saka Dewata yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan menolong penulis ketika membutuhkan bantuan selama di Malang;
12. Terimakasih yang tulus untuk Reihan Dewi Allam Saraswati yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan menolong penulis ketika membutuhkan bantuan.
13. Kawan-kawan terbaik penulis yang tersebar diseluruh Indonesia selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang selalu memberikan semangat membangun, menghibur, menemani penulis selama penulisan tugas akhir ini dan selalu ada setiap saat;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan yang sangat berarti bagi penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan hati semuanya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Untuk itu penulis senantiasa memohon saran dan kritik bagi para pembaca. Harapan penulis semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Malang, 07 Juli 2021
Penulis

Delta Husada

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PENYATAAN	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Bagi Masyarakat.....	7
2. Bagi Aparat Penegak Hukum	7
3. Bagi Penulis.....	8
4. Bagi Pemerintah	8
F. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Lokasi Penelitian	8
3. Sumber Data	9
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Analisis Data	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13

A. Konsep dan Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	13
B. Konsep Mengenai Pembuktian dan Sidang Acara Cepat/Ringan Tilang Lalu Lintas	16
C. Alat Rekam CCTV dan Rekaman Video di Media Sosial Sebagai Alat Bukti Pelanggaran Lalu Lintas	18
D. Tinjauan Yuridis Tentang Penggunaan Rekaman Video Sebagai Bukti Pelanggaran Lalu Lintas	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Deskripsi Satlantas Polres Malang	23
B. Pembuktian Pelanggaran Lalu Lintas yang Dibuktikan Dengan Adanya Rekaman Video	27
BAB IV PENUTUP	38
A. Kesimpulan	38
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	42



DAFTAR TABEL

Data Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum Polres Malang.....	5
Kecamatan di Kabupaten Malang.....	26
Data Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum Polres Malang.....	30
Bagan Proses Penelitian Keaslian Rekaman Video.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas.....	42
Lampiran 2 : Jurnal Bimbingan Skripsi.....	43
Lampiran 3 : Surat Izin Observasi.....	45
Lampiran 4 : Surat Bukti Observasi.....	46



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amarudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 30
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991,hal 17
- Djajoesman, H.S. 1986. *Polisi dan Lalu Lintas*. Cetakan Kedua, Sinar Grafika,Bandung, 1986, hlm, 9.
- M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,Jakarta: Sinar Grafika, hlm 273
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Jakarta: CitraAditya Bakti, 2012), hal. 1-2
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm.57
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa , Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm.6
- Soerjono Sukanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 75

Jurnal

- Arianda, R.A. (2017). *Penggunaan Alat Bukti Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal Poenale, 5:(3). h.8
- Insan Pribadi, 2018, *Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana*, No. 1 Vol. 3, Lex Renaissance
- Ramiyanto, R. (2017), *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(3), 463-484
- Roro Ayu Arianda, et.al, , Jurnal Poenale, Volume 5, Nomor 3, Desember 2017, hal *Penggunaan Alat Bukti Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) Dalam Proses Peradian Pidana* 4

Umboh, P.J. (2013). *Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana*. Lex Crimen, 2(2). h.113

Yenny, A.S, Purba C.S., & Lipi, L . (2017). *Kedudukan Closed Circuit Television Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*. Jurnal Hukum Media Bhakti, 1(2), 170-181

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman

Hasil wawancara

Hasil wawancara dengan Aipda Haris Kurniawan, S.H (Kepala Bagian Urusan Tilang Polres Malang)

Hasil wawancara dengan Ipda Transtoto Argo Kuncoro, S.H (Kepala Unit Reserse Kriminal Umum Polsek Kepanjen)



SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratri Novita Erdianti, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Delta Nurda

Nim : 201710110311919

Dengan Judul Skripsi :

Kekuatan Hukum Penggunaan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Pelanggaran
Kejahatan C. Studi Kasus di Palma Malang

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Agustus 2021.....

Ratri Novita Erdianti, SH., MH